PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA AKAD KERJASAMA PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Miti Yarmunida dan Wulandari

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu

yarmunidamiti@gmail.com

Abstract: *Determining the profit-sharing ratio in Islamic concepts is a necessity. The system of determination of the profit-sharing ratio should refer to the principle of fairness of inter-personal balance of the conduct of the council. The behavior of the Muslim community in Indonesia, especially in the villages, is still a lot that does not set the profit-sharing ratio at the time of agreement (akad). As with the livestock raising, the yield-sharing system is set at the time of the outcome and often the determinant of how much of each part is the owner of the livestock. The unilateral provision makes one party feel unfair and is forced to accept his part.*

Keywords: *Nisbah Profit-Sharing, Cooperation Agreemen*

Pendahuluan

Islam disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh alam. Kemaslahatan manusia yang dijaga oleh Islam salah satunya kebutuhan akan harta. Secara absolut harta hanya milik Allah, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja dengan cara-cara yang sudah Allah tetapkan. Harta yang dibutuhkan manusia bisa dicari sendiri tanpa bantuan orang lain seperti mengambil kayu bakar di hutan, dan bisa juga bekerjasama dengan orang lain. Manusia Allah ciptakan sebagai makhluk sosial yang

tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan cara tolong menolong maupun dengan cara akad tabadul. Islam memberi batasan dalam tolong menolong, batasan yang dimaksud sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dan pelanggaran*”.¹

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tolong menolong itu hanya terbatas pada kebaikan, sebaliknya tidak boleh tolong menolong dalam hal pelanggaran hukum syara'. Salah satu contoh usaha tolong menolong dalam kebaikan yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pemelihara modal. Bagi hasil menurut syariat Islam salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal (100%) sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.²

Sistem *mudharabah* masih bersifat umum namun akad ini dapat pula

diaplikasikan pada peternakan atau sering disebut bagi hasil peternakan. Yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1967 pasal 17 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menjelaskan bahwa bagi hasil ternak dan persewaan ternak tersebut dalam pasal ini ditentukan atas dasar persetujuan dan perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal ini. Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanah yang dititipkan oleh pemilik kepada orang lain untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.³

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama, mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. *Kedua, mudharabah muqayyad* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h.85

²Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h. 105

³Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 pasal 17, http://perpus.stainpamekasan.ac.id/index.php=swoh_detail, 24 November 2015

daerah bisnis.⁴ Adapun syaratnya adalah pertama, pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. *Kedua*, penerimaan modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati. *Ketiga*, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Sedangkan rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah pemilik modal (*shahibul mal*), pelaku usaha (*mudharib*), objek usaha dan akad.⁵

Hasil usaha yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagi dengan *shahibul mal* berdasarkan kesepakatan. Hasil dari usaha yang dilakukan *mudharib* dalam mengelola keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan dibagi dengan nisbah yang disepakati. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.⁶

Harta sebagai modal dalam bermudharabah yang diserahkan kepada pengelola bisa berbentuk uang, bangunan dan kelengkapannya, mobil, hewan ternak, dan lain-lain. Dalam hal mudharabah pada pemeliharaan hewan ternak, maka pemilik hewan ternak menyerahkan hewan ternaknya untuk dipelihara (penggemukan atau pengembangbiakan) oleh pemelihara (*mudharib*) kemudian disepakati nisbah bagi hasilnya ketika akad kerjasama berlangsung. Pratiknya pada masyarakat muslim terutama di pedesaan, kerjasama antara pemilik hewan ternak dengan pemelihara nisbah bagi hasilnya tidak jelas dan tidak ditetapkan di awal kerjasama sehingga seringkali terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil kerjasama.⁷

Kajian Teori

A. Terminologi *Mudharabah*

Mudharabah, berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.⁸ Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah kerjasama usaha

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 185

⁵ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.71

⁶ Buchari Alma, Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 10

⁷ Wulandari, *Sistem Pelaksanaan Paroan Sapi Di Desa Bukitpeninjauan1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2016

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah, 2010), h. 229

antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).⁹Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, pengertian *mudharabah* dapat diperinci sebagai berikut:

- a. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.¹⁰
- b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian

pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.¹¹

- c. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.¹²

Menurut istilah, *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹³
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah: akad syirkah dalam laba, satu

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 224

¹⁰ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 123

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 224

¹² Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement...*, h. 124

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 136

- pemilik harta dan yang lain pemilik jasa.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: "Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)".
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:" Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui".¹⁴
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:" Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan".
- f. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: " seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama-sama".
- g. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:"Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian".
- h. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- i. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.¹⁵

Mudharabah dalam terminologi hukum adalah kontrak dimana harta tertentu atau stok (*Ras al-Mal*) diberikan oleh pemilik (*Rabb al-Mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerja sama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta (*mudharib*). Kontrak ini adalah kerja sama bagi hasil.¹⁶

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kerja sama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerjaan dalam hal ini bukan orang yang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 137

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 138

¹⁶Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 467

berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.¹⁷

B. Dasar hukum *Mudharabah*

a. Al- Quran

Melakukan *mudharabah* adalah boleh (*mubah*). Berdasarkan firman Allah Swt yang terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.¹⁸

Dalam surat Al- Muzzammil ayat 20:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.¹⁹

Firman Allah QS. An-Nisa' ayat 29:

¹⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.244

¹⁸Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...*, h.123

¹⁹Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.120

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.²⁰

Firman Allah QS.al-Baqarah ayat 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... .

Artinya: “...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.²¹

Dari ayat-ayat al-Quran di atas jelaslah bahwa *mudharabah* merupakan akad yang dibolehkan. *Mudharabah* merupakan salah satu cara bekerja sama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di atas bumi.

b. Hadis

²⁰Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ..., h. 65

²¹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ..., h. 38

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda:

عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:”Dari Shuhaib, bahwasanya Nabi saw telah bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²²

Hadis di atas menjelaskan bahwa akad *mudharabah* dibolehkan dalam syariat Islam dan akan membawa keberkahan dari Allah Swt.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ. وَلَا تَحْمِلْهُ فِي بَحْرِ، وَلَا تَنْزِلْ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَالِي) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

Artinya:”Dari hakim Bin Hizam, bahwasanya adalah ia mensyaratkan atas seseorang apabila ia beri modal sebagai

mudharabah: jangan engkau gunakan modal-ku pada barang yang berjiwa dan jangan taruh diaa di laut dan jangan engkau bawa dia ke tengah perjalanan air bah; jika engkau berbuat sesuatu dari yang demikian, maka engkau tanggung modal-ku”. (HR. Daraquthni dan rawi-rawinya tsiqat).²³

Hadis di atas menjelaskan bahwa kebolehan dalam melakukan transaksi *mudharabah*. Hadis ini menunjukkan praktik pembiayaan *mudharabah*, karena pemilik modal sebagai penyedia dana yang memeberikan beberapa persyaratan bagi pemelihara dalam mengelola dana yang diberikan. Dengan demikian, mengandung pengertian bahwa pemilik modal berhak memeberikan batasan terhadap pengelolaan modal yang diberikan kepada pengelola.

c. Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma’*.²⁴

d. Qiyas

²²Al-Asqalani, Al- Hafiz Ibn Hajar, *Bulughul araam*, Terjemahan, A. Hassan, (Bandung: CV Diponegoro, 1991), h 469

²³Al-Asqalani, Al- Hafiz Ibn Hajar, *Bulughul araam...*, h. 470

²⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h.226

Mudharabah diqiyaskan kepada *musyarah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁵

e. Ijtihad

Para ulama beralasan, bahwa praktik *mudharabah* dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantah. Bahkan, harta yang dilakukan secara *mudharabah* itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadis, dan praktik para sahabat, para Ulama Fiqh menetapkan, bahwa akad *mudharabah* bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hukumnya boleh.²⁶

f. Kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁷

Adapun hikmah dibolehkannya *muamalah* dalam bentuk *mudharabah* itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga; sedangkan di pihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak memiliki modal. Dengan cara ini kedua pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.²⁸

Hakikat dari *muamalah* dalam *mudharabah* itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu ia adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha.²⁹

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.226

²⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia...*, h. 121

²⁷ Ichwan Sam, et al., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah ...*, h. 80

²⁸ Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 245

²⁹ Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 246

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

1. Pemilik modal (baik berupa uang atau barang) yang menyerahkan modalnya;
2. Orang yang bekerja, yaitu orang yang mengelola modal yang diterima dari pemilik modal;
3. *Akad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola modal;
4. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal;
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Nisbah bagi hasil.³⁰

Terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

1. Pemodal dan pengelola
 - a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
 - b. Keduanya harus mampu sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
 - c. Ada tiga kategori tindakan bagi *mudharib*, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kontrak, yaitu menyangkut seluruh pekerjaan utama dan sekunder

yang diperlukan dalam pengelolaan kontrak.

- 2) Tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum, yaitu tindakan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas utama tapi membantu melancarkan jalannya usaha.
- 3) Tindakan yang berhak dilakukan *mudharib* tanpa izin eksplisit dari penyedia dana, misalnya meminjam atau menggunakan dana untuk keperluan pribadi.³¹

d. Tindakan yang dilakukan *shahibul maal* dalam *mudharabah* antara lain adalah tindakan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan teknis operasional, seperti membeli dan menjual.³²

2. *Sighat* atau *ijab* dan *qabul*

Sighat harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.³³ Pelafalan dilakukan dengan cara yang dapat mengindikasikan ke arah

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 138

³¹Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia...*, h. 122

³²Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement...*, h.127

³³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 228

terlaksananya perjanjian, baik berupa ucapan atau tindakan.³⁴

3. *Modal*

- a. Harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu, mata uang)
- b. Harus tunai. Beberapa ulama memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdagangan, misalnya inventaris. Pada waktu akad, nilai aset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal *mudharabah*. Mazhab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset nonmoneter seperti pesawat, kapal dan lain-lain untuk modal *mudharabah*. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia aset dan pada akhir masa kontrak pengelola harus mengembalikan aset-aset tersebut.³⁵

4. *Nisbah keuntungan*

- a. Harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk Persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.³⁶
- c. Bila jangka waktu *mudharabah* relatif lama (3 tahun keatas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d. Penyedia dana atau pemilik modal menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.³⁷
- e. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh pengelola. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.³⁸
- f. Untuk pengakuan keuntungan harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu *mudharabah*. Menurut Fiqh Islam

³⁴Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 106

³⁵Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement...*, h. 128

³⁶Nurul Huda, Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam...*, h.76

³⁷Nurul Huda, Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam...*, h. 76

³⁸Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia...*, h.123

OKI, keuntungan dapat dibayarkan ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi dan hanya dapat dibayarkan pada waktu dibagikan.

- g. Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafi'i, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan, Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali menyebut, bahwa keuntungan hanya dapat diakui ketika dibagi secara tunai kepada kedua pihak.
- h. Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan oleh *shahibul mal*, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku sepanjang kerja sama masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat, bahwa pengelola akan diminta menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.³⁹

D. Macam-Macam *Mudharabah*

Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah* adalah pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan keluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
2. *Mudharabah muqayyad* adalah pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada peneglola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaa, lokasi usaha, dan sebagainya.⁴⁰

E. Hal Yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh si pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan

³⁹ Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia..., h.124

⁴⁰ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement...*, h. 126

- ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
 3. Apabila pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi *fasakh* (batal). Bila *mudharabah* telah *fasakh* pengelola modal tidak berhak mengelola modal *mudharabah* lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dunia dan tanpa izin para ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai *ghasab*. Ia wajib menjaminkan (mengembalikannya), kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungannya dibagi dua.⁴¹
 4. Salah satu pelaku akad menjadi gila. *Mudharabah* batal menurut ulama selain Syafi'iyah dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu permanen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kelayalan/ kemampuan).⁴²
 5. Murtadnya pemilik modal. Jika pemilik modal murtad dari agama Islam atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.⁴³

F. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil pada *Mudharabah*

Nisbah adalah : 1) Rasio atau perbandingan; Rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara shahibul mal dan mudharib.2) Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan; sin. Rasio

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.512

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 512

⁴³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 238

(ratio). Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik shahibul mal, maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh shahibul mal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan. 18

G. Macam-macam nisbah

Nisbah bagi hasil dapat dibedakan dengan sebutan-sebutan sebagai berikut:

- a. Nisbah aktiva tetap terhadap modal bersih adalah nisbah ini digunakan untuk menentukan tingkat investasi dalam aktiva tetap dengan modal yang dimiliki oleh pemilik usaha bisnis, dalam ketentuan bidang perbankan nisbah aktiva. 18 Muhammad, Teknik, h.99 . 20 tetap terhadap modal bersih tidak boleh melebihi 50% (ratio of fixed assets to net worth).
- b. Nisbah at-tamwil wa al-wada'i adalah financing to deposit Ratio (FDR). Rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiganya ; Rasio penyaluran dan penghimpunan dana.
- c. Nisbah fi ihtiyathi naqdi adalah rasio cadangan tunai (cash ratio); bagian dari total aktiva bank komersial yang di tahan dalam bentuk aktiva yang mempunyai likuiditas tinggi untuk menghadapi penarikan uang oleh nasabah dan kewajiban keuangan lainnya.
- d. Nisbah jariyah adalah rasio lancar (quick ratio), perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek.
- e. Nisbah jumlah modal adalah rasio jumlah modal (total capita/ ratio)
- f. Nisbah kas adalah rasio kas (cash ratio)
- g. Nisbah laba bersih terhadap modal bersih adalah nisbah untuk menilai resiko kredit, yaitu kemampuan bisnis (kegiatan usaha) untuk menghasilkan laba dalam satu periode (rate of net profits to net worth)
- h. Nisbah laba terhadap aktiva (ROA) adalah laba bersih dibagi total aktiva; ROA merupakan rasio atau nisbah utama untuk mengukur kemampuan dan efisiensi aktiva dalam menghasilkan laba (profitabilitas) (return on assets/ ROAi) Nisbah laba terhadap modal adalah laba bersih dibagi modal sendiri merupakan rasio atau nisbah profitabilitas yang mengukur tingkat kemampuan modal dalam menghasilkan laba bersih (return on equity/ ROE) 21

- i. Nisbah likuiditas adalah nisbah yang mengukur kemampuan bank, perusahaan, atau peminjam untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo; nisbah ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar (liquidity ratio)
- j. Nisbah modal primer terhadap asset adalah modal inti dibagi rata-rata total aset (primary capitol to assets ratio)
- k. Nisbah modal sesuaian adalah rasio modal yang telah disesuaikan terhadap total aset, rasio ini digunakan dalam perhitungan kecukupan modal; perhitungan modal bank dilakukan dengan memperhitungkan cadangan kerugian kredit macet, cadangan kerugian/ keuntungan surat berharga dikurangi dengan kredit yang diklasifikasikan macet (adjusted capital ratio)
- l. Nisbah modal terhadap resiko asset adalah jumlah modal dibagi rata - rata total aset nilai setiap aset tersebut didasarkan pada bobot resikonya (capital to risk assets ratio)
- m. Nisbah perputaran adalah nisbah yang menunjukkan tingkat kecepatan konversi piutang menjadi kas atau lamanya perputaran aset menjadi kas (turnover ratio)
- n. Nisbah si'ri al sahmī ila al ribhī adalah rasio pendapatan terhadap harga suatu saham (price earning ratio-PER)
- o. Nisbah utang terhadap modal bersih adalah nisbah ini digunakan untuk menetapkan proporsi utang terhadap modal bersih yang digunakan dalam kegiatan usaha (ratio of debt to networth)⁴⁴.

Karakteristik Nisbah Bagi Hasil Menurut Karim (2004), terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari: a) Presentase Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp). b) Bagi untung dan bagi rugi Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing -masing pihak. c) Jaminan-Jaminan yang akan diminta terkait dengan character risk yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggungnya adalah mudharib. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh business risk, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib. d) Besaran nisbah Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul mal dan mudharib. e) Cara

⁴⁴ Muhammad, Teknik, h.100-101

menyelesaikan kerugian. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.⁴⁵

Teori Penetapan Nisbah Bagi Hasil Wahbah Zuhaili Hasil investasi pada bank - bank Islam ditentukan dengan cara seperti yang berlaku dalam perusahaan - perusahaan dengan modal bersama (syarikah musahamah) dalam jangka periode tertentu, yaitu tahun buku, karena mempertimbangkan bahwa karakteristik mudharabah musytarakah adalah terus berkesinambungan secara kontinyu.

Berdasarkan hal ini, keuntungan investasi yang dilaporkan pada setiap akhir tahun buku tidak ditetapkan kecuali hanya untuk dana yang tetap ada dari awal tahun sampai akhir tahun. Oleh sebab itu, apabila pihak investor (penanam modal, nasabah) pada mudharabah musytarakah menarik dananya secara keseluruhan atau sebagiannya sebelum akhir tahun buku dimana belum ada laporan keuntungan, maka dana yang ditarik itu tidak mendapatkan porsi atau bagian dari keuntungan yang baru akan dihitung, dilaporkan, selanjutnya dilakukan proses distribusi pembagian, pada akhir tahun buku. Hal ini memiliki padanan yang diberlakukan dalam mudharabah khusus

yang hokum - hukumnya ditetapkan oleh fuqaha Islam.

Ar-Ramli dalam kitab, "Nihayatul Muhtaj", menyebutkan, apabila pihak pemilik modal menarik sebagian modal qiradh (mudharabah) sebelum tampak untung ruginya, berarti yang berstatus sebagai modal mudharabah adalah sisanya. Karena modal yang disisakan di tangan mudharib oleh pemilik modal hanya itu berarti sama saja seakan-akan pihak pemilik modal hanya menyerahkan modal sebanyak itu saja.²⁴ Hasil investasi bisa diketahui dengan cara mengalikan dana investasi yang ada dengan jangka waktu dimana dana itu tetap terinvestasikan dan hasilnya adalah yang biasa dikenal dengan sistem an-namr atau al a'daad pada aktivitas perbankan yang menerapkan sistem riba, yaitu mengalikan saldo harian dengan jumlah hari di mana saldo itu masih ada. Angka hasil penjumlahan itulah kadar bunga untuk satu hari. Dengan catatan bahwa keuntungan didapatkan dengan harta (dana), atau dengan kerja sesuai dengan kesepakatan yang ada, atau dengan tanggungan kerja seperti yang ada pada perkongsian kerja (syarikah al a'mal), dan pendanaan pelaku peng-ghasaban. Karena keuntungan adalah sebagai perbandingan kerugian, dalam arti keuntungan sesuatu adalah untuk orang yang menanggung kerugian sesuatu tersebut. Oleh sebab itu,

⁴⁵Muhammad, *Teknik*, h. 102

ketika syarik (mitra, partner) adalah yang menanggung kerugian ketika terjadi kerugian karena suatu hal, jika ada keuntungan, maka semua keuntungan itu adalah untuknya. Jika terjadi kerugian, dirinyalah yang menanggungnya. Jika ada keuntungan, keuntungan itu pula menjadi haknya seluruhnya. Karena investasi non riba adalah investasi produksi yang berpatokan pada keuntungan riil yang tidak bisa tercapai dengan akselerasi kecepatan yang biasa digunakan dalam investasi perbankan untuk melakukan perhitungan bunga, maka formula penghitungan perbankan yang dipraktikkan oleh bank-bank Islam adalah dengan menggunakan patokan periode bulan, bukan hari. Oleh sebab itu, orang yang menyerahkan dana sebesar seribu dinar misalnya untuk investasi tahunan, tentu tidak sama dengan orang yang menyerahkan dana dengan jumlah 25 yang sama pada pertengahan tahun, yakni investasi selama waktu enam bulan saja. Sehingga hasil investasi tahunan lebih banyak dengan persentase 9% misalnya, sedangkan hasil investasi setengah tahun saja pada investasi tahunan, persentase hasil investasinya adalah separuh dari persentase hasil investasi tahunan. Dari Ahmad An-Najjar Menyebutkan, satuan periode ada kalanya menggunakan hitungan hari, minggu, atau bulan sesuai dengan ketentuan dan aturan

yang dirumuskan oleh pihak bank yang bersangkutan dan dipublikasikan kepada para nasabah. Secara prinsip, hal ini bisa diterima jika memang nyata - nyata ada keuntungan yang didapatkan secara riil seperti yang akan dijelaskan di bagian mendatang. Dr. Ahmad An-Najjar menambahkan, dalam kasus-kasus adanya perubahan jumlah dana salah seorang investor di dalam waktu satu tahun, karena terjadi penambahan atau penarikan, maka perhitungan an-Nimr dilakukan atas dasar saldo dana investasi setelah terjadinya setiap perubahan, yaitu antara tanggal perubahan dan tanggal penghentian investasi atau akhir tahun buku mana yang lebih dekat. Ada cara lain, yaitu mengambil perbedaan antara nimr dana yang ditambahkan dan nimr dana yang ditarik terhitung dari tanggal penambahan dan tanggal penarikan sampai tanggal penghentian investasi atau sampai akhir tahun buku mana yang lebih dekat. Kedua cara ini akan sampai kepada hasil nimr yang sama.⁴⁶

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga hubungan antar makhluk. Begitu pula saat seseorang membutuhkan pertolongan,

⁴⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid VII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 113-114.

untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Salah satunya dalam *mudharabah* (bagi hasil), Islam mensyariatkan dan memperbolehkan kegiatan tersebut untuk memberi keringanan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ...
وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dan pelanggaran”.⁴⁷

Ayat di atas menjadi prinsip dasar bagi manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial sehingga mendorong mereka untuk bekerja sama baik secara formal maupun non formal untuk saling tolong menolong dalam:

1. Mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan;
2. Kompetisi untuk meningkatkan taqwa.

Sebaliknya dilarang berkoalisi untuk melanggar syi'ar-syi'ar Allah SWT, dilarang kerja sama untuk menciderai orang lain, melakukan penipuan baik sendiri maupun berjamaah, berbuat dosa, batil,

zalim dan permusuhan baik sendiri maupun berjamaah.⁴⁸

Pernyataan akad *mudharabah* antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat, yaitu: Pertama, harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Kedua, harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan kerja sama. Ketiga, harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua.⁴⁹

Keuntungan dalam *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pertama, Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Kedua, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Ketiga, penyedia dana atau pemilik modal menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau

⁴⁷Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ..., h.85

⁴⁸Ali hasan, *Manajemen Bisnis Syariah...*, h. 240

⁴⁹Veithzal Rivai, H, *Islamic Financial Management...*, h. 126

pelanggaran kesepakatan.⁵⁰ Kerugian hendaklah ditutup (diganti) dengan keuntungan. Kalau masih juga rugi, kerugian itu hendakla dipikul oleh yang punya modal sendiri, berarti yang bekerja (pemelihara) tidak dituntut mengganti kerugian.⁵¹

Pemelihara (*mudharib*) dalam *mudharabah* tidak menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Ketika terjadi kerugian maka apapun bentuk kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal.

Kesimpulan

Islam mensyariatkan *mudharabah* sebagai wadah tolong menolong saling menguntungkan bagi pemodal dan pengelola (*mashlahah*). *Mashlahah* dapat dicapai dalam bermudharabah dengan memenuhi prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, termasuk di dalamnya tentang prinsip keadilan yang harus dipedomani dalam menetapkan nisbah bagi hasil *mudhrabah* tersebut. Penetapan nisbah bagi hasil oleh salah satu pihak yang bermudharabah tentu saja boleh jika terpenuhi unsur keadilan di dalamnya,

sebaliknya, apabila ditetapkan sepihak dan tidak adil maka *mudharabah*nya fasid.

Daftar Pustaka

- Alma,Buchari, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Al-Asqalani, Al- Hafiz Ibn Hajar, *Bulughul maraam*, Terjemahan, A. Hassan,Bandung: CV Diponegoro, 1991.
- Amri, Kholifatul, “Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Revenue Sharing Akad Mudharabah di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu,Skripsi, STAIN Bengkulu, 2012.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Gunawan,Imam, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hakim, Lukman,*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarata: Erlangga, 2012.

⁵⁰Nurul Huda, Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam...*, h. 76

⁵¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 300

- Huda, Nurul, Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sam, Ichwan, *et al.*, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sugiono, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Tanzeh, Ahmad, *metodologi penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 pasal 17, http://perpus.stainpamekasan.ac.id/index.php=swoh_detail, 24 November 2015
- Utami, Idfi Listia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syirkah mudharabah Ternak Kambing Sistem Nggaduh di Desa Mekar Jaya Kecamatan Ulu Talo*”, Skripsi, Syariah: muamalat, STAIN Bengkulu, 2012.
- Wati, Meri Ardita “*Pelaksanaan Paroan Pemeliharaan Kerbau di Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut konsep mudharabah*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu, 2015.
- Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah, 2010.